

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, biologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional¹.

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu Lempeng Benua Asia, Benua Australia, Lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera - Jawa - Nusa Tenggara - Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat². Letak astronomis wilayah Indonesia

¹ Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

² [https : //bnpb.go.id](https://bnpb.go.id) diakses tanggal 11 juli 2018.

terletak antara 6 derajat Lintang Utara - 11 derajat Lintang Selatan dan antara 95 derajat Bujur Timur - 141 derajat Bujur Timur³.

Sumatera Barat yang berada di tepian Pulau Sumatera juga memiliki potensi bencana alam yang besar, termasuk Kota Padang. Dari segi geografis atau topologi, Kota Padang menjadi salah satu kota di Indonesia yang paling rawan bencana. Dilihat dari geologinya wilayah Kota Padang terdiri dari perpaduan bentuk lahan vulkanik di bagian Timur, bentuk lahan aluvial bagian tengah dan lahan marin bagian barat karena memiliki beberapa sungai yang memiliki aliran permanen sepanjang tahun. Kondisi ini menyebabkan Kota Padang rawan bencana banjir. Tingginya tingkat bahaya banjir disebabkan oleh curah hujan tinggi dan terjadinya pasang surut air laut. Tingkat bahaya banjir tinggi umumnya tersebar pada daerah yang memiliki satuan bentuk lahan daratan aluvial dan rawa⁴.

Wilayah Kota Padang terletak di bagian pantai barat Pulau Sumatera yang berhubungan langsung dengan Samudera Hindia sehingga memiliki ombak cukup besar yang berpotensi terjadinya gelombang ekstrim dan abrasi. Secara tektonik wilayah Barat Indonesia merupakan wilayah yang sangat dinamis. Hal ini disebabkan oleh proses subduksi/interaksi 2 lempeng, yaitu Lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Dengan adanya proses tersebut, daerah Kota Padang menjadi rawan terhadap peristiwa gempa bumi⁵.

³ Sri Sudarmi Waluyo, *Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu*, 2008, Semarang : PT. Sindur Press

⁴ *Dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Kota Padang* hlm 5

⁵ *Ibid.* hlm 6

Terdapat delapan jenis bencana yang teridentifikasi pernah terjadi di Kota Padang berdasarkan sejarah kejadian yang tercatat dalam Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Diantaranya bencana gempa bumi yang merupakan bencana dengan dampak yang cukup besar bagi Kota Padang, seperti pada tabel 1.1:

Tabel 1.1

Sejarah Kejadian Bencana di Kota Padang Tahun 1815–2012

Bencana	Jumlah Kejadian	Meninggal (orang)	Luka-luka (orang)	Hilang (orang)	Menderita (orang)	Mengungsi (orang)	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan
Banjir	38	62	40	4	13.424	980	65	0
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	8	2	6	0	384	7.656	760	1.232
Gempa bumi	11	774	2.462	4	0	0	79.016	167.232
Kebakaran Hutan dan Lahan	1	0	0	0	0	0	0	0
Kekeringan	1	0	0	0	0	0	0	0
Cuaca Ekstrim	5	0	5	0	0	100	11	11
Tanah Longsor	10	48	9	4	0	0	18	2
JUMLAH	78	898	2.530	18	13.808	8.736	79.870	168.477

Sumber: Data & Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 1815-2012

Dari Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa bencana banjir paling sering terjadi di Kota Padang. Kejadian ini hampir meliputi seluruh wilayah di Kota Padang. Hal ini dikarenakan banyaknya pemukiman di daerah rendah dan di sepanjang aliran sungai. Kejadian banjir juga memiliki frekuensi kejadian yang hampir terjadi tiap tahun dan mengalami peningkatan kejadian. Namun bencana gempa bumi merupakan bencana yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang paling besar di antara bencana-bencana lainnya.

Adanya data pada tabel menjelaskan bahwa Kota Padang merupakan kota yang rawan akan bencana alam. Untuk itu dibutuhkan upaya dari seluruh masyarakat dalam melakukan sebuah mitigasi bencana agar dampak dari bencana tersebut dapat diminimalisir. Pengetahuan mengenai kesiapsiagaan bencana harus benar-benar ditanamkan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, Mahyeldi Ansharullah (Wali Kota Padang) mengatakan, penanganan mitigasi bencana harus dilakukan secara intens, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi setiap ancaman bencana⁶. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan mendasar seluruh masyarakat untuk mengurangi dampak bencana yang terjadi di Kota Padang.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 9 dan PP No 21 Tahun 2008, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 6, arti mitigasi adalah upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana⁷.

Mitigasi merupakan bentuk upaya pencegahan dan pengurangan kemungkinan risiko, pengurangan konsekuensi risiko, menghindari risiko, penerimaan risiko, serta transfer, pembagian, atau penyebarluasan risiko. Ada dua jenis mitigasi yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural adalah usaha pengurangan risiko yang dilakukan melalui pembangunan atau perubahan fisik melalui penerapan solusi yang

⁶ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/07/31/otyfcf425-padang-luncurkan-sekolah-cerdas-bencana> diakses tanggal 10 Juni 2018.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

dirancang. Mitigasi ini mencakup ketahanan konstruksi, langkah-langkah pengaturan dan kode bangunan, relokasi, modifikasi struktur, konstruksi tempat tinggal masyarakat, konstruksi pembatas, atau sistem pendeteksi, modifikasi fisik, sistem pemulihan dan penanggulangan infrastruktur untuk keselamatan hidup⁸.

Mitigasi non struktural meliputi pengurangan kemungkinan atau konsekuensi risiko melalui modifikasi proses-proses perilaku manusia atau alam, tanpa membutuhkan penggunaan struktur yang dirancang. Mitigasi ini mencakup langkah-langkah regulasi, program pendidikan dan kesadaran masyarakat, modifikasi fisik non struktural, modifikasi perilaku serta pengendalian lingkungan.

Mitigasi bencana itu penting dilakukan agar seluruh masyarakat cerdas dan tidak panik disaat menghadapi terjadinya bencana. Dengan adanya pengetahuan tentang mitigasi bencana diharapkan mampu mengurangi dampak dari bencana alam yang terjadi seperti mengurangi korban jiwa, kerugian material, dan dampak-dampak lainnya. Untuk itu pengetahuan tentang mitigasi bencana tersebut dianggap sangat penting diberikan pada seluruh lapisan agar dapat menciptakan masyarakat yang mampu menghadapi datangnya bencana dan lebih siap dalam menghadapi bencana, terlebih menghadapi bencana yang datang tanpa peringatan awal atau tanda-tanda seperti gempa dan tsunami.

Mitigasi bencana tersebut akan lebih baik jika dilakukan dalam bidang pendidikan. Bidang pendidikan dianggap salah satu bidang yang tepat untuk dilaksanakan penguatan kapasitas kebencanaan atau mitigasi bencana. Tempat terjadinya pendidikan mitigasi

⁸ Bevaola Kusumasari, 2014, Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal, Gava Media: Yogyakarta.

bencana adalah sekolah. Sekolah merupakan satuan pendidikan yang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan harus mampu mengembangkan potensi peserta didiknya baik dalam hal keagamaan, kepribadian, kecerdasan dan juga budaya kesiapsiagaan bencana. Upaya itu dilakukan dengan dibentuknya sebuah lembaga yang bernama Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia (KPBI). KPBI mencatat program-program terkait mitigasi bencana dalam bentuk SSB (Sekolah Siaga Bencana), PRBBS (Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Sekolah) dan SRA (Sekolah Ramah Anak).

Mitigasi bencana di aspek pendidikan telah dilakukan sejak tahun 2012 di Sumatera Barat. Dimulai dari adanya program SMAB (Sekolah Madrasah Aman dari Bencana) yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah Madrasah Aman dari Bencana. Program SMAB ini memiliki fokus untuk mengurangi dampak risiko bencana gempa bumi dan tsunami⁹.

Program SMAB ini sulit untuk dilakukan sepenuhnya karena tentu saja membutuhkan biaya yang besar untuk pelaksanaan sosialisasi selama 6 bulan tersebut. Sehingga pihak BPBD Kota Padang merasa bahwa program ini tidak efektif untuk dilaksanakan di Kota Padang. Sesuai dengan wawancara peneliti dengan salah satu staff pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang :

“Program SMAB ini lebih difokuskan pada kerentanan sekolah yang terdiri dari lokasi, struktur, desain dan sarana/prasarana. Untuk mewujudkan itu tentunya sebelum sekolah tersebut dibangun hal-hal tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu. Namun pada dasarnya sekolah itu telah ada dan dibangun sebelum adanya program SMAB ini.

⁹ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah Madrasah Aman dari Bencana.

Dalam hal ini maka program ini sulit untuk diwujudkan. Apalagi program ini membutuhkan dana dan waktu yang banyak dan dirasa tidak efektif. Terlebih melakukan sosialisasi dan pemberian materi kebencanaan dalam satu sekolah selama 6 bulan secara intensif membutuhkan dana, sumberdaya dan waktu yang maksimal¹⁰.”

Dari wawancara tersebut membuktikan bahwa program SMAB (Sekolah Madrasah Aman dari Bencana) tidak dapat dilakukan di Kota Padang, karena dirasakan kurang efektif karena kekurangan dana dan Sumber Daya Manusia.

Di tahun 2018 dibuat sebuah program lain dalam mengupayakan mitigasi bencana dari aspek pendidikan di Kota Padang yang bernama Sekolah Cerdas Bencana yang merupakan adaptasi dari program SMAB. Sekolah Cerdas Bencana (SCB) merupakan upaya membangun kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana dalam rangka menggugah kesadaran seluruh unsur-unsur dalam bidang pendidikan baik individu maupun kolektif di sekolah dan lingkungan sekolah baik itu sebelum, saat maupun setelah bencana terjadi¹¹. Dari program ini diharapkan mencapai enam *output* penting¹²:

- a. Membentuk Kelompok Siaga Bencana Sekolah.
- b. Adanya identifikasi ancaman bencana.
- c. Penyusunan dokumen rencana evakuasi sekolah.
- d. Penyusunan SOP tanggap darurat sekolah.
- e. Melaksanakan latihan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan simulasi evakuasi mandiri.

¹⁰ Wawancara dengan staff Pencegahan BPBD Kota Padang

¹¹ Konsep Dasar Sekolah Cerdas Bencana (Data dari BPBD Kota Padang)

¹² Konsep Umum Sekolah Cerdas Bencana (Data dari BPBD Kota Padang)

- f. Adanya rencana tindak lanjut terkait penerapan Sekolah Cerdas Bencana secara berkesinambungan.

Lembaga terkait yang berwenang dalam penanggulangan bencana ini adalah Pemerintah Kota Padang. Pada penelitian ini yang dimaksud Pemerintah Kota Padang adalah bagian eksekutif yakni Walikota Padang dan kemudian menunjuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang (yang selanjutnya disebut BPBD) sebagai lembaga yang berwenang atas penanggulangan bencana di Kota Padang.

BPBD pada awalnya tergabung dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dan bernama Dinas BPBDPK (Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran) Kota Padang. Pemisahan, peleburan dan penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Padang pada tahun 2016 mengacu pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang. Dalam aturan tersebut BPBDPK (Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran) dipisah menjadi dua instansi yang berdiri sendiri yakni BPBD Kota Padang dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang.

Tugas Pokok dan fungsi BPBDPK yang dulunya diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 70 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran berubah menjadi aturan baru yakni berupa Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.



BPBD dalam menjalankan Sekolah Cerdas Bencana dibantu oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Kebencanaan Kota Padang. LSM ini ikut langsung dalam pelaksanaan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana ke sekolah-sekolah. OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Padang lain yang terkait dalam kegiatan Sekolah Cerdas Bencana ini adalah Dinas Pendidikan Kota Padang. Peran Dinas Pendidikan Kota Padang dalam kegiatan Sekolah Cerdas Bencana tidak begitu besar yakni Dinas Pendidikan memberikan izin ke BPBD Kota Padang untuk masuk ke sekolah-sekolah terpilih menyampaikan materi Sekolah Cerdas Bencana itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti berikut:

”Dalam kegiatan Sekolah Cerdas Bencana, BPBD Kota Padang pernah memberikan sosialisasi terkait kegiatan tersebut. Dalam kegiatan Sekolah Cerdas Bencana ini, Dinas Pendidikan Kota Padang memberikan izin ke BPBD masuk ke sekolah-sekolah terpilih untuk penyampaian materi Sekolah Cerdas Bencana tersebut. Dinas Pendidikan Kota Padang juga sesekali turun langsung ke sekolah untuk melihat langsung pelaksanaan Sekolah Cerdas Bencana. Hal lain dalam pelaksanaan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana diserahkan sepenuhnya kepada BPBD Kota Padang”¹³.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, BPBD memiliki tugas dalam penetapan pedoman dan pengarahan tentang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan peraturan daerah yang berlaku. Standarisasi dan kebutuhan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana juga merupakan tugas dari BPBD¹⁴.

¹³ Wawancara dengan Kepala Bagian Kesiswaan Dinas Pendidikan Kota Padang.

¹⁴ Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang

BPBD Kota Padang bertanggung jawab atas segala upaya penanggulangan bencana yang terjadi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019. Fungsi BPBD antara lain adalah perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh¹⁵.

BPBD Kota Padang dibagi menjadi tiga bidang yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan logistik dan Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi¹⁶. Pelaksanaan mitigasi bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang dari BPBD tepatnya pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Berikut gambar struktur organisasi BPBD Kota Padang¹⁷:



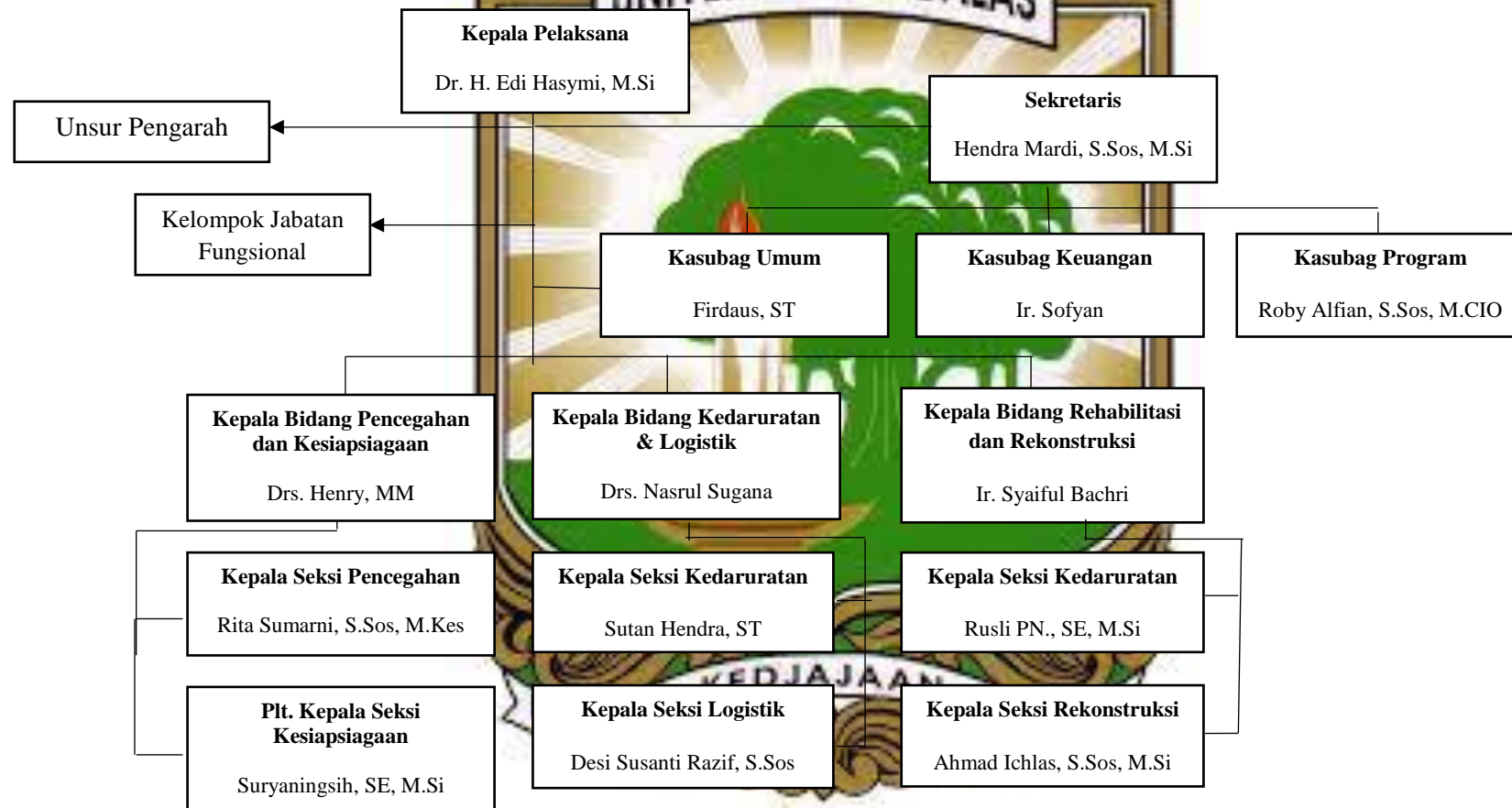
¹⁵ Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019

¹⁶ Data Kelembagaan BPBD Kota Padang tahun 2018.

¹⁷ Data Kelembagaan BPBD Kota Padang Tahun 2018

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Tahun 2018



Sumber: Peraturan Walikota Padang Nomor 95 Tahun 2016

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini memiliki tugas membantu Kepala Pelaksana dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat.

Melihat pentingnya peran BPBD Kota Padang dalam melakukan mitigasi bencana maka harus memiliki kapabilitas sebagai *leading sector* pada kegiatan mitigasi bencana di Kota Padang. Cigler juga berpendapat bahwa kemampuan sebagai kapasitas dan dalam hal kapasitas, pemerintah daerah harus memiliki kapasitas keuangan, teknis, hukum, sumber daya manusia, politik, dan kelembagaan untuk melakukan kegiatan di semua tahapan rutin kondisi darurat. Faktor-faktor penting kapabilitas dalam manajemen bencana adalah kelembagaan, sumber daya manusia, implementasi kebijakan, keuangan, teknis dan kepemimpinan¹⁸.

Kelembagaan dilihat dari struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab serta mampu menjalin *networking* dengan semua level pemerintah. Sumber Daya Manusia yang ada dalam organisasi harus cukup sesuai dengan pembagian pekerjaan dan delegasi yang jelas juga. Pada tahun 2018, BPBD Kota Padang memiliki 42 pegawai tetap dan 30 orang pegawai tidak tetap. Ke-30 orang tersebut merupakan tenaga Pusdalops PB (Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana) dan tenaga *rescue* penanggulangan bencana yang masuk dalam bagian kedaruratan dan logistik BPBD Kota Padang. Berikut daftar pegawai BPBD Kota Padang berdasarkan pendidikan¹⁹:

¹⁸ Bevaola Kusumasari, 2014, Manajemen bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal, Yogyakarta : Gava Media.

¹⁹ Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil BPBD Kota Padang Tahun 2018

Tabel 1.2**Daftar Pegawai BPBD Kota Padang**

Pegawai	Pendidikan				
	SMA	D3	S1	Magister	S3
Pria	12	2	12	4	3
Wanita	5	-	3	1	-

Sumber : Olahan Peneliti dari Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil BPBD Kota Padang Tahun 2018

Dalam kegiatan Sekolah Cerdas Bencana, bagian dari BPBD Kota Padang yang memiliki wewenang adalah seluruh Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang dipimpin oleh Drs. Henry MM. Pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan tersedia 9 orang pegawai, yakni Drs. Henry, MM , Rita Sumarni S.Sos. M.Kes, Suryaningsih, S.E, M.Si , Duen Marsal, S.E , Rezko Yunanda, A.Md , Zomarita, SKM , Hidayat, Syafruddin dan M.Sofyan²⁰.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia sangat menentukan kapabilitas sebuah organisasi. Kekurangan Sumber Daya Manusia dapat menurunkan hasil kerja dari sebuah organisasi sehingga tidak mampu mencapai tujuan organisasi dengan maksimal. Dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang saat ini tersedia di BPBD Kota Padang, BPBD merasa kesusahan melakukan setiap kegiatan dan tugas yang ada, sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti berikut²¹ :

”Dengan Sumber Daya Manusia yang saat ini ada, yakni 41 orang, BPBD Kota Padang merasa kesulitan. Karena asumsi saat ini adalah BPBD Kota Padang bukanlah sebuah badan lintas sektor namun merupakan sebuah tenaga. Jika keadaan akan terus seperti itu, mungkin akan diperlukan sekitar 100 orang Sumber Daya Manusia yang harus ada di BPBD Kota Padang agar mampu menjalankan

²⁰ Absensi BPBD Kota Padang tahun 2019.

²¹ Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum BPBD Kota Padang.

segala kegiatan dan tugas yang ada di BPBD Kota Padang, dan Sumber Daya Manusia tersebut berasal dari berbagai jurusan dan keahlian. Tidak sedikit dari Sumber Daya Manusia tersebut hanya mengikuti hal yang sudah tersistem dan kemudian berkembang terkait kebencanaan di BPBD Kota Padang ini”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa BPBD Kota Padang mengalami kekurangan Sumber Daya Manusia untuk mampu menjalankan kapabilitasnya dengan baik. BPBD Kota Padang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan dan tugasnya dalam penanggulangan bencana di Kota Padang.

Dalam hal anggaran dana penanggulangan bencana berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan masyarakat²². Berikut rekapitulasi anggaran tahun 2016-2020 (termasuk DSP (Dana Siap Pakai)/ DTT (Dana Tidak Terduga) :

Tabel 1.3
Tabel Rekapitulasi Anggaran Penanggulangan Bencana

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)		
	2016	2017	2018
APBD Kab/Kota	13,674,794,350	7,546,869,900	6,319,706,514

Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2018 (Data Kelembagaan BPBD Kota Padang)

Dana tersebut digunakan oleh BPBD Kota Padang selaku badan yang berwenang dalam upaya penanggulangan bencana yang terjadi. Dari data tersebut menggambarkan bahwa BPBD Kota Padang tidak menerima asupan dana dari APBN dan dari masyarakat. Dana di setiap tahun tersebut digunakan untuk upaya

²² Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

penanggulangan bencana dalam jangka waktu setahun pula. Dilihat pula dari tahun 2016 ke tahun 2018 dana yang didapat semakin berkurang.

Dalam kegiatan Sekolah Cerdas bencana, BPBD Kota Padang mendapatkan aliran dana dari APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 278.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah)²³. Anggaran tersebut digunakan oleh BPBD Kota Padang dalam menjalankan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Besar anggaran tersebut diambil dari anggaran tahunan yang didapat BPBD Kota Padang dari APBD Kota Padang.

Dana tersebut dirasakan kurang dalam pelaksanaan Sekolah Cerdas Bencana. Untuk itu kegiatan Sekolah Cerdas menyesuaikan dengan dana yang dirasakan minim itu. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti²⁴ :

“Dana yang tersedia untuk kegiatan Sekolah Cerdas Bencana memang kurang. Jika dana yang didapatkan lebih, mungkin kegiatan Sekolah Cerdas Bencana dapat terlaksana lebih maksimal lagi. Terlebih lagi dalam hal penyediaan sarana pendukung kegiatan Sekolah Cerdas Bencana”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dana dalam pelaksanaan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana tersebut dirasa masih kurang. Untuk hasil yang maksimal, harus dengan ketersediaan dana yang cukup. Dana minim tersebut menjadikan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana menyesuaikan dengan dana yang

²³ Kerangka Acuan Kerja Sekolah Cerdas Bencana Tahun 2018 (Data dari BPBD Kota Padang)

²⁴ Wawancara peneliti dengan Staff Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang Rezko Yunando pada 18 November 2018 pukul 09.30 WIB.

ada. Hal tersebut mengartikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan juga mengikuti dana yang tersedia.

Kepemimpinan juga merupakan salah satu faktor penting dalam suatu kapabilitas organisasi. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi²⁵. Pemimpin akan mempengaruhi bagaimana kapabilitas organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan.

Dalam hal teknis, lembaga terkait BPBD Kota Padang membutuhkan sistem manajemen logistik dan sistem teknologi informasi yang efektif untuk mampu berkomunikasi dengan berbagai *stakeholder*. Sistem manajemen logistik merupakan suatu sistem yang menjelaskan tentang logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana pada masa pra bencana, pada saat terjadi bencana, dan pada pasca bencana²⁶. Berikut standar operasional atau alur pendistribusian logistik pada BPBD Kota Padang²⁷.



²⁵ Miftah Thoha, 2010, Kepemimpinan dalam Manajemen, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

²⁶ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.

²⁷ Standar Operasional Prosedur Logistik (Data dari BPBD Kota Padang)

Tabel 1.4
Alur Pendistribusian Logistik

No	Uraian	Pelaksana		
		Tim Reaksi Cepat	Kasi Logistik	Kabid Kedaruratan dan Logistik
1	Memberikan laporan kejadian bencana dan mengajukan permintaan logistik yang dibutuhkan korban bencana			
2	Menghimpun semua data yang diperoleh			
3	Memeriksa pengajuan bantuan logistik sesuai kebutuhan			
4	Mencatat dan memeriksa barang kepada korban			
5	Mendokumentasikan dan mengarsipkan laporan pendistribusian barang logistik			

Sumber : Standar Operasional Prosedur Logistik (Data dari BPBD Kota Padang Tahun 2018)

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa BPBD Kota Padang sudah memiliki Standar Operasional Prosedur tentang pendistribusian logistik yang jelas. Dalam Standar Operasional Prosedur tersebut juga sudah memiliki bagian-bagian dari BPBD Kota Padang yang bertanggung jawab atas setiap langkah atau proses pendistribusian logistik tersebut.

Dalam Kapabilitas, implementasi kebijakan merupakan hal yang penting. Dengan tersedianya undang-undang, kebijakan, dan peraturan sebagai landasan pengambilan keputusan, menjalin hubungan dengan institusi lain mampu menunjukkan bahwa organisasi memiliki kapabilitas. Peraturan yang ada juga berguna untuk memobilisasi sumber daya yang ada.

Dalam melaksanakan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang tidak melakukan kegiatan mitigasi

bencana pada tingkat Sekolah Menengah Atas, karena merupakan kewenangan provinsi dan bukanlah ruang lingkup kota. Aksi ini tidak dilakukan langsung oleh Pihak BPBD Kota Padang, namun dibantu oleh organisasi-organisasi kebencanaan yang memiliki pengalaman dan tetap diawasi dan dikoordinir oleh Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan. Hal ini juga diakibatkan kurangnya Sumber Daya Manusia yang tersedia di BPBD Kota Padang materi sosialisasi disusun bersama oleh BPBD Kota Padang dan organisasi tersebut. Organisasi-organisasi tersebut antara lain :

- a. Mercy Corps Indonesia
- b. KOGAMI
- c. Jemari Sakato
- d. DRR Indonesia

BPBD Kota Padang merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Padang, sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. Dalam hal penanggulangan bencana di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam melaksanakan kegiatannya BPBD Kota Padang membutuhkan institusi lain untuk mampu mendukung segala hal yang dilakukan BPBD sendiri. Terlebih lagi, penanggulangan bencana berguna bagi seluruh lapisan masyarakat, maka institusi apapun itu harus berhubungan dengan BPBD dalam hal upaya penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana, BPBD Kota



Padang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, sekolah, LSM Kebencanaan. Kerjasama tersebut dalam rangka memberikan izin pada BPBD Kota Padang untuk masuk ke sekolah dan memberikan sosialisasi materi penanggulangan bencana di sekolah.

Di Kota Padang sendiri belum ada penyelenggaraan kurikulum kebencanaan tersebut. Informasi yang didapatkan oleh peneliti dari wawancara bahwa kurikulum kebencanaan tersebut tidak bisa diberlakukan di pendidikan Kota Padang. Wawancara ini dilakukan bersama dengan salah satu staff pencegahan di BPBD Kota Padang yang turut serta dalam sebuah rapat BPBD dan Dinas Pendidikan yang membahas mengenai Sekolah Cerdas Bencana. Isi wawancara itu antara lain:

“....terkait dengan kurikulum kebencanaan yang akan dimuat di Pendidikan Kota Padang benar-benar tidak dapat dilakukan karena Dinas Pendidikan menolak dengan alasan akan mengganggu mata pelajaran sekolah yang dianggap penting. Penolakan itu terjadi saat rapat yang kami lakukan bersama Dinas Pendidikan terkait Sekolah Cerdas Bencana, dimana kami sempat menanyakan perihal kurikulum kebencanaan namun dengan tegas Dinas Pendidikan menolak untuk mengadakan kurikulum tersebut dengan pertimbangan akan mengganggu mata pelajaran lainnya di sekolah”²⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa terkait kurikulum kebencanaan di Kota Padang benar-benar tidak ada di sekolah. Dengan adanya kurikulum kebencanaan tersebut di Kota Padang, dianggap dapat mengganggu mata pelajaran substansial lain yang telah ada di sekolah. Oleh karena itu mata pelajaran terkait mitigasi bencana tidak dapat dimuat dalam kurikulum di sekolah.

Salah satu penyebab banyaknya jumlah korban dari setiap bencana alam yang terjadi adalah kurangnya pengetahuan, keterampilan dan ketanggapan setiap

²⁸ Wawancara dengan staff Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, Bapak Rezko Yunanda, ST tanggal 25 Maret 2019 pukul 14.00 WIB.

masyarakat dalam langkah penanggulangan bencana²⁹. Untuk itu pendidikan mengenai penanggulangan bencana memang harus diaplikasikan dalam sekolah. Pendidikan mengenai mitigasi bencana tersebut mampu mengurangi dampak dari bencana alam.

Upaya mitigasi bencana di Kota Padang yang dilakukan BPBD harus turut didukung oleh seluruh lapisan masyarakat agar mitigasi dapat mencapai sasaran yang luas. Seperti yang dikatakan oleh Walikota Padang :

“Mahyeldi mengatakan, Padang dikenal sebagai kota istimewa. Alasannya, kondisi geografisnya serta potensi keindahan alamnya yang mempesona bersanding dengan topografinya berupa pantai dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia ombaknya cukup tinggi. Selain itu, risiko bencana lain yang bisa mengadang setiap saat adalah gempa bumi dan tsunami. "Maka itu kita menginginkan, di samping masyarakat, warga sekolah di Kota Padang harus cerdas dalam mitigasi bencana. Salah satunya melalui program Sekolah Cerdas Bencana ini," kata Mahyeldi”³⁰.

Pelaksanaan upaya mitigasi tersebut harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk warga sekolah. Melalui pendidikan diharapkan agar upaya pengurangan risiko bencana dalam mitigasi bencana dapat mencapai sasaran yang lebih luas dan dapat diperkenalkan lebih dini kepada peserta didik. Pelaksanaan mitigasi di sekolah dilakukan agar warga sekolah tidak merasa panik saat menghadapi bencana. Lebih baik lagi jika di lingkungan sekolah telah disediakan tempat-tempat aman sementara terhindar dari bencana, serta tenaga pendidik dan elemen lain di sekolah mampu menjadi pembimbing bagi pendidiknya agar mampu menghadapi bencana nantinya. Untuk itu pendidik dan elemen sekolah

²⁹ Wawancara dengan staff Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, Bapak Rezko Yunanda, ST pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 14.00 WIB

³⁰ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/07/31/otyfcf425-padang-luncurkan-sekolah-cerdas-bencana> diakses tanggal 28 Juni 2018

lainnya juga harus sadar dan mengetahui upaya-upaya mitigasi yang dilakukan di sekolah.

Bentuk upaya mitigasi bencana gempa dan tsunami dari aspek pendidikan yang dilakukan oleh BPBD dalam program Sekolah Cerdas Bencana berupa :

Tabel 1.5

Bentuk Mitigasi Bencana dari Aspek Pendidikan yang Dilakukan oleh BPBD



No	Aktivitas	Waktu	Target	Sasaran
1	Workshop Persiapan Penerapan SCB Stakeholders Pendidikan dan Kebencanaan	1 hari	40 orang	Stakeholders Pendidikan dan Kebencanaan
2	Penilaian Mandiri Awal oleh Sekolah (Baseline)	2 hari	20 orang	Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah, Siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus
3	Pelatihan PRB dan Sekolah Cerdas Bencana untuk Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah dan Pemerintah Desa	3 hari	40 orang	Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah dan Pemerintah Desa
4	Pelatihan PRB dan Sekolah Cerdas Bencana untuk Anak/Siswa	4 hari	30 siswa	Seluruh siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus
5	Workshop Kajian Risiko Bencana Partisipatif dan inklusif dengan mempertimbangan kapasitas	2 hari	10 orang	Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah, Siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus

	warga sekolah berkebutuhan khusus			
6	Workshop Penyusunan Rencana Aksi dan Pembentukan Tim Siaga Bencana di Sekolah	2 hari	10 orang	Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah dan perwakilan siswa.
7	Workshop Pembuatan Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana Sekolah, Peta Jalur Evakuasi, Rambu Evakuasi, Titik Kumpul Dan Pembuatan Media Publikasi Sekolah	4 hari	15 orang	Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah dan perwakilan siswa
8	Simulasi Kesiapsiagaan di lingkungan sekolah	2 hari	100 orang	Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah dan seluruh siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus
9	Penilaian Mandiri Akhir (Endline)	2 hari	20 orang	Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah, Warga sekitar sekolah, perwakilan siswa
10	Workshop Hasil Evaluasi Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut	1 hari	30 orang	Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah, BPBD, Dinas Pendidikan/Kandepag, Legislatif, perwakilan siswa

Sumber: Dokumen Petunjuk Teknis Sekolah Cerdas Bencana BPBD Kota Padang, 2018

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa BPBD telah melakukan kegiatan workshop-workshop dalam rangka pencapaian mitigasi bencana gempa dan tsunami dari

aspek pendidikan. Hal itu diketahui dari hasil survey awal yang dilakukan peneliti melalui wawancara :

“Kami telah melakukan berbagai upaya mitigasi bencana dari aspek pendidikan melalui kegiatan workshop, tetapi dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut, kami mendapatkan kendala dimana ada beberapa sasaran yang kami sosialisasikan kurang tanggap, mereka tidak merespon dengan baik serta adanya sikap yang ditunjukkan kurang peduli dengan sosialisasi yang kami berikan sehingga berdampak terhadap pelaksanaan program tersebut. Juga kami merasa membutuhkan pihak lain dalam melaksanakan program karena kurangnya sumber daya manusia yang tersedia di BPBD ini”³¹.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa adanya kendala yang ditemukan BPBD dalam pelaksanaan Program Mitigasi Bencana (Sekolah Cerdas Bencana) dalam Aspek Pendidikan, dimana adanya kekurangan Sumber Daya Manusia, dan keluhan BPBD mengenai respon kurang baik dalam menanggapi proses sosialisasi yang dilakukan.

Fokus program ini dilakukan pada sekolah yang berada di zona merah tsunami Kota Padang, sejumlah 468 sekolah. Pada tahun 2018, BPBD memiliki target sejumlah 47 sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai dengan yang termuat pada dokumen Grand Design Kota Padang Cerdas Bencana. Namun pada pelaksanaannya BPBD Kota Padang juga melakukan program Sekolah Cerdas Bencana ini pada 47 sekolah yang terdiri dari tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ke 47 sekolah tersebut dipilih dengan pertimbangan :

a. Lokasi sekolah kurang dari 300 meter dari sisi pantai dan bersebelahan sungai

³¹ Wawancara dengan Kepala BPBD Kota Padang, Bapak Dr. Edi Hasymi M.Si tanggal 21 Agustus 2018, pukul 13.00 WIB.

- b. Di sekolah tersebut tidak pernah ada sosialisasi kebencanaan sejenis
- c. Jumlah peserta didik jika Sekolah Dasar lebih dari 50 orang dan Sekolah Menengah Pertama lebih dari 500 orang.

Mercy Corps Indonesia, KOGAMI, Jemari Sakato, dan DRR Indonesia ini dipilih oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang karena keempat pihak ini yang dirasa lebih berkompeten dibandingkan pihak lainnya dalam hal kebencanaan terkhusus gempa dan tsunami. Pada awalnya BPBD mengirimkan surat yang mengajak keikutsertaan keempat pihak ini dalam pelaksanaan program Sekolah Cerdas Bencana.

Setelah menyetujui permintaan tersebut, keempat pihak ini memberikan utusan nama-nama orang yang ikut serta dalam program Sekolah Cerdas Bencana. Kemudian BPBD Kota Padang membuat Surat Keputusan pelaksana kegiatan Sekolah Cerdas Bencana. Hal ini termuat dalam Keputusan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Nomor 116 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Nomor 60 tahun 2018 Tentang Tenaga Ahli dan Fasilitator Kegiatan Sekolah Cerdas Bencana. Aturan ini berisi orang-orang yang akan turut langsung dalam pelaksanaan program Sekolah Cerdas Bencana. Berikut daftar sekolah yang menjadi sasaran BPBD Kota Padang dalam melakukan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana³²:

³² Daftar Sekolah Cerdas Bencana (Data dari BPBD Kota Padang)

Tabel 1.6

Daftar Sekolah yang Didampingi dalam
Kegiatan Sekolah Cerdas Bencana Tahun
2018

25

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan	Lembaga
1	SD NEGERI 14 OLO	Jl. Samudera No. 24	Kec. Padang Barat	DRRI
2	SD NEGERI 10 BEROK NIPAH	Jl. Muara No. 51	Kec. Padang Barat	DRRI
3	SD NEGERI 09 BEROK NIPAH	Jl. Muara No. 51	Kec. Padang Barat	DRRI
4	SD NEGERI 27 OLO	Jl. Samudera	Kec. Padang Barat	DRRI
5	SD NEGERI 29 PURUS	Jl. Purus V No. 118	Kec. Padang Barat	DRRI
6	SD NEGERI 03 dan 04 PURUS	Jl. Veteran No. 31	Kec. Padang Barat	MERCY
7	SD NEGERI 13 dan 21 PURUS	Jl. Veteran No. 31	Kec. Padang Barat	MERCY
8	SMP NEGERI 39 PADANG	Jl. Sawo No. 20, PURUS V	Kec. Padang Barat	DRRI
9	SMP NEGERI 3 PADANG	Jl. Pulau Karam No. 98, Kp. Pondok	Kec. Padang Barat	DRRI
10	SMP NEGERI 4 PADANG	Jl. Pulau Karam No. 82, Kp. Pondok	Kec. Padang Barat	DRRI
11	SD NEGERI 19 PASAR LABAN	Jl. Padang Painan Km 20	Kec. Bungus Teluk Kabung	DRRI
12	SD NEGERI 01 PASAR LABAN	Jl. Padang Painan Km 20	Kec. Bungus Teluk Kabung	Jemari Sakato
13	SD NEGERI 12 PASAR TELUK KABUNG	Jl. Padang Painan Km 24	Kec. Bungus Teluk Kabung	KOGAMI
14	SD NEGERI 13 SUNGAI PISANG	Jl. Sungai Pisang	Kec. Bungus Teluk Kabung	Praktisi
15	SD NEGERI 06 CINDAKIR	Jl. Padang Painan Km 22	Kec. Bungus Teluk Kabung	Praktisi
16	SD NEGERI 21 CINDAKIR	Jl. Padang Painan Km 21	Kec. Bungus Teluk Kabung	Praktisi
17	SD NEGERI 20 LABUHAN TAROK	Jl. Padang Painan Km 17	Kec. Bungus Teluk Kabung	Praktisi
18	SD NEGERI 03 BATUNG	Jl. Padang Painan Km 23	Kec. Bungus Teluk Kabung	Praktisi

19	SD NEGERI 18 KANDANG LABUHAN TAROK	Jl. Sunkyong Baru Km 18	Kec. Bungus Teluk Kabung	Praktisi
20	SD NEGERI 10 KOTO	Jl. Padang Painan Km 24 Koto RT 02 RW 02	Kec. Bungus Teluk Kabung	Praktisi
21	SMP NEGERI 37 PADANG	Jl. Sungai Pisang	Kec. Bungus Teluk Kabung	Praktisi
22	SMP NEGERI 19 PADANG	Jl. Padang - Painan Km 19	Kec. Bungus Teluk Kabung	MERCY
23	SMP NEGERI 13 PADANG	Jl. Lapangan Bola Tabing, Parupuk Tabing	Kec. Koto Tengah	DRRI
24	SD 32 BUNGO PASANG	Komp Pasir Putih Tabing	Kec. Koto Tengah	Jemari Sakato
25	SD NEGERI 23 PASIR SEBELAH	Jl. Pasir Sebelah	Kec. Koto Tengah	Jemari Sakato
26	SD NEGERI 31 PASIR KANDANG	Jl. Pasir Kandang	Kec. Koto Tengah	Jemari Sakato
27	SD NEGERI 45 BUNGO PASANG	Jl. Gunung Kawi Wisma Indah V	Kec.Koto Tengah	Jemari Sakato
28	SD NEGERI 06 PASIR JAMBAK	Jl. Pasir Jambak	Kec. Koto Tengah	Jemari Sakato
29	SMP NEGERI 42 PADANG	Jl. Pasir Jambak	Kec. Koto Tengah	Jemari Sakato
30	SD NEGERI 35 PADANG SARAI PADANG	Jl. Padang Sarai	Kec. Koto Tengah	KOGAMI
31	SD NEGERI 27 PEMANCUNGAN	Jl. Pemancungan	Kec. Padang Selatan	MERCY
32	SD NEGERI 07 AIR MANIS	Jl. Air Manis	Kec. Padang Selatan	MERCY
33	SD NEGERI 34 SEBERANG PALINGGAM	Jl. Seberang Palinggam	Kec. Padang Selatan	MERCY
34	SMP NEGERI 35 PADANG	Jl. Seberang Palinggam	Kec. Padang Selatan	MERCY
35	SD TIRTONADI	Jl. Kampung Batu Nomor 59	Kec. Padang Selatan	MERCY
36	SD NEGERI 29 PEBAYAN PENGKALANGAN	Jl. Seberang Penggalangan	Kec. Padang Selatan	MERCY

37	SD NEGERI 15 LOLONG	Jl. S. Parman BLK TMP	Kec. Padang Utara	KOGAMI
38	SD NEGERI 23 LOLONG	Jl. S. Parman BLK TMP	Kec. Padang Utara	KOGAMI
39	SD NEGERI 29 ULAK KARANG UTARA	Jl. Sumatera	Kec. Padang Utara	KOGAMI
40	SD NEGERI 19 AIR TAWAR BARAT	Jl. Patenggangan No. 16 J	Kec. Padang Utara	KOGAMI
41	SMP NEGERI 40 PADANG	Jl. Bunda/ Samping Bung Hatta	Kec. Padang Utara	KOGAMI
42	SD NEGERI 25 AIR TAWAR SELATAN	Jl. Merak Air Tawar	Kec. Padang Utara	MERCY
43	SD NEGERI 18 AIR TAWAR SELATAN	Jl. Merak Air Tawar	Kec. Padang Utara	MERCY
44	SD NEGERI 04 GAUANG	Jl. Bitung No. 5 Gaung	Kec. Lubuk Begalung	KOGAMI
45	SD NEGERI 09 GAUANG	Jl. Bitung No. 5 Gaung	Kec. Lubuk Begalung	KOGAMI
46	SD NEGERI 13 SEI. BEREMAS	Jl. Padang-Painan	Kec. Lubuk Begalung	Praktisi
47	SD NEGERI 21 TELUK KABUNG	Jl. Padang-Painan	Kec. Lubuk Begalung	Praktisi

Sumber : Data Olahan peneliti (Sekolah SCB Tahun 2018)



Dari tabel 1.3, dapat dilihat bahwa BPBD memberikan materi kepada 47 sekolah (39 SD dan 8 SMP) yang ada di Kota Padang. Dari 47 sekolah yang termuat dalam tabel 1.3 tersebut telah mengalami perubahan atau pergantian satu sekolah. Ada satu sekolah yang menolak yakni SD Baiturrahmah 1-3 Padang untuk diberikan materi cerdas bencana atau dilaksanakannya program Sekolah Cerdas Bencana. Sekolah tersebut menolak dengan alasan dengan masuknya BPBD untuk melakukan program tersebut dapat mengganggu jam pelajaran yang telah tersusun di sekolah tersebut. Hal tersebut sangat disayangkan karena pada dasarnya pendidikan dan kemampuan tentang kebencanaan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap orang demi keselamatan diri. Dengan adanya sekolah yang menolak untuk dilaksanakan program tersebut di sekolahnya menggambarkan bahwa pengetahuan kebencanaan belum dianggap menjadi hal yang sangat penting bagi setiap orang.

Adapun materi-materi tersebut bertujuan agar dapat membangun budaya siaga, budaya aman dan budaya pengurangan risiko bencana di sekolah, serta membangun ketahanan warga sekolah dalam menghadapi bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam rangka memberikan perlindungan kepada peserta didik, guru, tenaga kependidikan dan masyarakat di sekitar sekolah dari ancaman dan dampak bencana. Serta bertujuan menyebarluaskan dan mengembangkan pengetahuan kebencanaan kepada masyarakat luas melalui jalur pendidikan Sekolah.

Pada kegiatan ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang memberikan predikat juara pada beberapa sekolah. Sekolah tersebut yakni Sekolah Dasar Negeri 27 Olo Kota Padang meraih juara pertama, Sekolah Dasar Negeri 13 Sei. Beremas meraih juara kedua, dan Sekolah Dasar Negeri 09 Gauang

mendapatkan juara ketiga. Sekolah-sekolah ini mendapatkan predikat juara sebagai *reward* dari Badan Penanggulangan Bencana karena dianggap pantas dijadikan teladan bagi sekolah-sekolah lainnya di Kota Padang.

Terpilihnya sekolah-sekolah ini sebagai juara dengan beberapa indikator penilaian dari tim penilai Sekolah Cerdas Bencana. Indikator-indikator penilaiannya yakni³³ :

- 
- a. Respon sekolah terkait pendampingan yang dilakukan
 - b. Dukungan/kontribusi/swadaya sekolah
 - c. Struktur tertulis
 - d. Dokumen tertulis
 - e. Peta evakuasi terpampang
 - f. SOP tertulis dan sudah diuji coba
 - g. Rencana aksi
 - h. Dokumentasi kegiatan sosialisasi
 - i. Pemahaman Tim SCB

Salah satu hasil dari program ini adalah peta evakuasi sekolah menuju titik evakuasi sementara. Peta evakuasi ini sangat penting bagi sekolah untuk mengetahui keadaan sekolah dan lokasi-lokasi aman dari sekolah di saat terjadi bencana gempa. Sekolah Dasar Negeri 27 Olo Kota Padang ini juga mendapat *reward* predikat juara I dari tim penilai Sekolah Cerdas Bencana.

³³ Penilaian Sekolah Cerdas Bencana (Data dari BPBD Kota Padang)

Predikat juara ini dinilai oleh tim penilai yang telah dipilih oleh BPBD Kota Padang yang dirasa memiliki kemampuan untuk menilai sekolah dalam program Sekolah Cerdas Bencana ini. Penilaian tersebut dilihat dari beberapa kriteria tertentu seperti respon sekolah, pemahaman tim tentang Sekolah Cerdas Bencana dan swadaya sekolah dan lain-lain. Peneliti memilih fokus pada tingkat sekolah dasar karena menganggap bahwa murid-murid sekolah dasar masih sangat membutuhkan perhatian dan pengembangan pengetahuan mereka terhadap mitigasi bencana. Sekolah yang dipilih BPBD Kota Padang sebagai target pelaksanaan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana adalah sekolah-sekolah yang berada di zona merah tsunami.

Peneliti memilih pada enam sekolah dasar dari setiap kecamatan dianggap menjadi perwakilan dari sekolah dasar-sekolah dasar yang berposisi paling rawan atau paling dekat dengan bibir pantai. Sekolah tersebut yakni SDN 27 Olo Padang, SDN 13 Sei. Beremas, SDN 09 Gauang, SDN 29 Ulak Karang, SDN 07 Pantai Air Manis dan SDN 06 Pasir Jambak Padang.

Terkait program Sekolah Cerdas Bencana ini, Dinas Pendidikan Kota Padang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang telah melakukan sosialisasi bersama sebelum program ini dilaksanakan. Saat program ini dilaksanakan, dinas menyerahkan ini selanjutnya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.

”Terkait saat program Sekolah Cerdas Bencana dilaksanakan Dinas Pendidikan hanya memberikan izin untuk masuknya BPBD Kota Padang untuk melakukan program tersebut ke sekolah-sekolah. Selanjutnya diserahkan kepada BPBD Kota Padang untuk melaksanakan programnya. Beberapa saat tertentu pihak Dinas

Pendidikan memperhatikan saat terlaksananya program tersebut di sekolah-sekolah”³⁴.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti diketahui bahwa Dinas Pendidikan tidak melakukan kontribusi berarti terkait program Sekolah Cerdas Bencana yang dilakukan BPBD Kota Padang. Pihak Dinas hanya memberikan izin untuk BPBD Kota Padang dalam melaksanakan program-programnya dan masuk ke sekolah-sekolah. Selanjutnya pihak Dinas sesekali hanya memperhatikan ke sekolah-sekolah saat terjadinya program tersebut.

Tindakan tentang pendidikan kebencanaan tersebut dirasa belum maksimal saat ini. Akan lebih baik lagi jika tindakan tersebut disertai dengan kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Padang dengan pihak BPBD Kota Padang sendiri. Namun nyatanya dalam kurikulum sekolah yang ada di Kota Padang belum termuat tentang pendidikan kebencanaan tersebut. Dengan tidak adanya kurikulum sekolah tentang pendidikan bencana tersebut maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan mitigasi dari aspek pendidikan di Kota Padang kurang terlaksana dengan baik.

Dalam kondisi Kota Padang yang rawan bencana ini sesungguhnya pendidikan kebencanaan sangat dibutuhkan dan dilakukan secara lebih intensif. Dengan adanya aturan tersebut maka seharusnya pendidikan mengenai mitigasi bencana tersebut dapat dimasukkan dalam sebuah kurikulum sebagai mata pelajaran muatan lokal. Dengan adanya kurikulum kebencanaan tersebut diharapkan peserta didik lebih sadar dan tanggap mengenai mitigasi bencana karena durasi penyajian materi tentang kebencanaan tersebut dapat dilakukan lebih lama.

³⁴ Wawancara dengan Kepala Seksi Kesiswaan Dinas Pendidikan Kota Padang, Bu Dra. Wasni pada tanggal 10 September 2018 pukul 14.00 WIB.

Dengan melihat fenomena-fenomena diatas, peneliti ingin melihat dan meneliti tentang “Kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam Mitigasi Bencana Melalui Sekolah Cerdas Bencana”.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan salah satu tahap diantara sejumlah tahap penelitian yang ada dan tentu saja memiliki kedudukan yang penting dalam suatu kegiatan penelitian. Merujuk pada uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam Mitigasi Bencana Melalui Sekolah Cerdas Bencana.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan analisis Kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam Mitigasi Bencana Melalui Sekolah Cerdas Bencana.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi studi akademis khususnya Ilmu Administrasi Publik di bidang Manajemen. Selain itu penelitian ini juga dapat menambah referensi dan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan Kapabilitas



Pemerintah Kota Padang dalam Mitigasi Bencana Melalui Sekolah Cerdas Bencana.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada pemerintah Kota Padang selaku pembuat kebijakan dalam pelaksanaan manajemen Kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam Mitigasi Bencana Melalui Sekolah Cerdas Bencana.

- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi stakeholders terkait dengan Kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam Mitigasi Bencana Melalui Sekolah Cerdas Bencana.

